

PEMBANGUNAN DAN KETERLIBATAN PEREMPUAN

Lestari Sukarniati

Development have the meaning and give the big expectation for resident in expanding nations. But in so many development case in some developing countries process this have caused the woman experience of the marginalization. In development fact in Indonesia, woman role exactly progressively mount posed at increasing the woman labor force participation larger from the men job participation level in same range of time.

1. Pendahuluan

Kata pembangunan menjadi suatu kata yang bermakna besar menurut anggapan banyak orang. Kata pembangunan seolah-olah memberikan harapan akan perubahan yang signifikan atas peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup semua penduduk dalam suatu negara sehingga banyak negara berkembang menjadikan kata tersebut sebagai alat pengayom bagi pemberian harapan untuk masyarakatnya.

Dengan usainya perang dunia II, konsep pembangunan menjadi wacana baru bagi negara-negara yang baru saja merdeka untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang telah lama memperoleh kemerdekaan. Pembangunan dianggap bisa memberikan harapan akan pemecahan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan seperti masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam perkembangannya kata pembangunan telah dijadikan sebagai alat politik terutama bagi Amerika Serikat dalam merebut simpati dari negara yang hancur akibat perang dunia II melalui bantuan pembangunan yang populer disebut sebagai Marshall Plan. Di Indonesia wacana pembangunan mulai dikenal begitu kemerdekaan diraih yaitu dengan disusunnya beberapa konsep perencanaan pembangunan seperti pembangunan Semesta Berencana namun dalam pelaksanaannya konsep-konsep yang disusun tersebut gagal dilaksanakan karena belum stabilnya politik pada awal kemerdekaan yaitu karena antara lain seringnya terjadinya pergantian kabinet. hal tersebut dapat dimaklumi mengingat kebijakan-kebijakan makroekonomi tak bisa luput dari keputusan-keputusan politis. Barulah setelah disusunnya konsep rencana pembangunan Lima Tahun (repelita) pada tahun 1969 istilah tersebut menjadi tidak asing lagi. Program pembangunan jangka panjang tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan yang disebut Rencana pembangunan lima tahun. Selama pelaksanaan pembangunan, arah dari jalannya pembangunan tersebut ditujukan pada tiga sasaran yaitu yang disebut sebagai Trilogi pembangunan yaitu stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hanya saja prioritasnya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masalah yang dihadapi. Dalam pelita I (1967-1974) prioritas pertama diarahkan pada penciptaan stabilitas baru kemudian prioritas kedua adalah

pertumbuhan kemudian pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam Pelita II sasaran pertumbuhan mendapatkan prioritas yang pertama baru pemerataan dan kemudian. Sejak Pelita III (1979-1984) hingga Repelita VI (1994-1999) urutan prioritas menjadi pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Perubahan komposisi trilogi pembangunan menunjukkan adanya pergeseran strategi pembangunan dari penekanan pada pertumbuhan beralih pada penekanan pemerataan. (Dumairy, 1996)

Selain menetapkan trilog pembangunan, ditetapkan pula delapan jalur pemerataan yang meliputi (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan (2) pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan (3) pemerataan pembagian pendapatan (4) pemerataan kesempatan kerja (5) pemerataan kesempatan berusaha (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air (8) kesempatan memperoleh keadilan.

2. Makna Pembangunan

Kata pembangunan memiliki beberapa makna. Meier & Baldwin (1957 : 2) memaknai kata pembangunan sebagai proses yang mendorong peningkatan pendapatan nasional riil dalam jangka panjang. Dalam hal ini ukuran yang dipakai untuk melihat keberhasilan ekonomi adalah dengan menggunakan pendapatan nasional riil sehingga dalam jangka panjang jika pendapatan nasional riil semakin tinggi maka dapat dikatakan pembangunan tersebut dapat berhasil terlaksana. Pembangunan juga diartikan sebagai industrialisasi, seperti yang dikemukakan Rostow (1960) misalnya. Dia mengemukakan bahwa terdapat lima tahap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut

- 1) Masyarakat tradisional
- 2) Prakondisi lepas landas
- 3) Kondisi lepas landas
- 4) Menuju kematangan
- 5) Konsumsi masa tinggi

Tahapan pembangunan yang dikemukakan Rostow tersebut didasarkan pada revaluasi Industri yang terjadi di Inggris. Pada tahapan pertumbuhan ekonomi yang lebih atas penggunaan teknologi dan capital lebih tinggi daripada tahap sebelumnya sampai pada tahap pertumbuhan yang terakhir sektor unggulannya bukan lagi barang modal tetapi telah beralih ke barang konsumsi dan jasa yang sangat kapital intensif

Menurut Todaro (2003), pembangunan adalah proses yang bersifat multidimensi. Suatu proses yang berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan proses perubahan yang bersifat mendasar kearah yang lebih baik terhadap struktur sosial, kelembagaan serta sikap masyarakat. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah melakukan perubahan total suatu masyarakat ke arah yang lebih baik, menyeluruh dengan tanpa mengabaikan keberagaman kebutuhan dasar dan keinginan setiap individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk itu terdapat tiga tujuan inti pembangunan yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan untuk memperbaiki kesejahteraan materiil dan menumbuhkan jati diri pribadi bangsa
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro, 2003)

Ketiga tujuan tersebut selayaknya diupayakan untuk dicapai secara bersamaan sehingga tujuan pembangunan yang tidak hanya mengedepankan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial masyarakat dapat terwujud. Untuk itu ada tiga hal yang menjadi nilai inti dari pembangunan yang harus tetap menjadi arahan dalam pelaksanaan, nilai inti tersebut adalah:

1. Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang dimaksud dengan kebutuhan dasar yaitu segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan terhentinya kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Proses pembangunan harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar tersebut. Tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar tersebut akan muncul kondisi keterbelakangan absolute. Dalam hal ini proses pembangunan dimaknai sebagai proses peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan absolute, penambahan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan
2. Jati diri (*selfesteem*): menjadi manusia seutuhnya
Proses pembangunan harus mampu menciptakan dorongan dari dalam diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, merasa dirinya pantas untuk melakukan dan mengejar sesuatu
3. Kebebasan dari sikap menghamba (*freedom*): kemampuan untuk memilih
Pembangunan harus menumbuhkan kemampuan untuk berdiri sendiri, tidak diperbudak oleh pengejaran terhadap aspek material (Todaro, 2003)

Menurut Rosenstein-Rodan (1953) dan Nurkse (1953) dalam Arsyad, Lincoln (1999:91), dengan melakukan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata. Tujuan utama dari strategi ini adalah menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi. Menurut Rosenstein-Rodan pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan tiga macam eksternalitas ekonomi yaitu:

- 1) Yang diakibatkan oleh perluasan pasar
- 2) Karena industri yang sama letaknya berdekatan
- 3) Karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut

Adanya pembangunan yang menciptakan eksternalitas menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan golongan miskin. Peningkatan pendapatan golongan ini mendorong pula peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok yang kemudian berdampak pada peningkatan produksi, kesempatan kerja dan selanjutnya pada peningkatan investasi. Jadi dengan semakin meratanya pendapatan maka diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dalam arti makin banyak masyarakat yang menikmati pembangunan sehingga semaksimal mungkin dapat dihindari masyarakat yang frustrasi yang akan melakukan tindakan destruktif terhadap hasil pembangunan karena merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Maka kemudian dikenal strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan yang antara lain dikemukakan oleh Rosenstein- Rodan, Nurkse, Lewis yang kemudian strategi-strategi mereka dikenal sebagai strategi pembangunan seimbang atau karena strategi tersebut memerlukan investasi yang sangat besar maka strategi tersebut biasa disebut dengan *big push theory*. Adapun dasar pemikiran strategi ini adalah supaya tidak timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun permintaan.

Dalam realita ternyata laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya mengurangi kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya *trickle down effect* yang terjadi secara otomatis. Selain itu dampak dari adanya *demonstration effect* yang melanda banyak anggota masyarakat negara berkembang dengan meniru pola konsumsi masyarakat negara maju telah pula mengakibatkan tingkat tabungan rendah sehingga sumber pendanaan investasi juga minim.

Tabel 1
Rasio Pendapatan 20 Persen Penduduk Terkaya
Terhadap 20 Persen Penduduk Termiskin

Tahun	Rasio Bagian Pendapatan Penduduk Terkaya Dengan Penduduk Termiskin
1960	30 to 1
1970	32 to 1
1980	45 to 1
1991	61 to 1
2000	70 to 1

Sumber : *United development Program 1992, 1994, 2001 (dalam Todaro, 2003)*

Dari table di atas terlihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antara anggota masyarakat di dunia semakin melebar. Pada tahun 1960, income rasionya sebesar 30:1, artinya pendapatan orang kaya 30 kali besarnya pendapatan orang miskin. Namun pada tahun 2000 rasio tersebut telah berubah menjadi 70:1. Itu artinya pada tahun 2000 pendapatan orang kaya 70 kali dari pendapatan orang miskin.

Dalam hal pembangunan, permasalahan di negara berkembang lebih besar karena tidak hanya sekedar mempertahankan pertumbuhan ekonomi seperti di negara-negara maju tetapi bagaimana negara tersebut dapat menciptakan akselerasi bagi pembangunannya untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju sehingga disparitas diantara kedua negara tersebut tidaklah menjadi semakin lebar.

3. Pandangan tradisional tentang peran perempuan

Di sebagian belahan dunia, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan menggambarkan tentang adanya perubahan peran. Keikutsertaan perempuan dalam berbagai kegiatan kerja produktif menyebabkan kekosongan / tidak adanya tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestic karena pekerjaan-pekerjaan tersebut ditinggalkan oleh perempuan yang secara normative punya peran domestic. Dalam kondisi kosong tersebut bisa jadi peran domestic diambil alih oleh laki-laki dan peran produktif diambil oleh perempuan. Sebelum terjadinya perubahan peran tersebut perempuan hanyalah melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik yang tidak dapat menghasilkan pendapatan secara tunai sehingga perempuan didudukkan sebagai tenaga kerja non produktif sedangkan pria sajalah yang bisa melakukan pekerjaan produktif dan dapat menghasilkan income, langsung didudukkan pada kelompok produktif.

Dalam teori Peran Gender, individu/ kelompok yang mampu menguasai sumber-sumber ekonomi didudukkan pada status yang tinggi yang biasanya diidentikkan dengan laki-laki, sedang individu yang tidak dapat menguasai sumber-sumber ekonomi kedudukannya dianggap lebih rendah seperti perempuan misalnya. Menurut Harton & Hunt (1977) peran maskulin dan feminine memiliki keanekaragaman yang tidak ada batasnya di dalam masyarakat, atau setiap masyarakat telah memiliki sepasang peran seks yang diakui dan setiap orang diharapkan akan mengakui. Perbedaan kedudukan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang dilihat melalui perbedaan gender terjadi pada seluruh masyarakat baik masyarakat tradisional maupun pada masyarakat yang sudah relatif lebih maju. Parson (1964) menjelaskan bahwa dalam konteks struktur keluarga, peran perempuana khususnya dan peran anggota keluarga pada umumnya telah mengalami perubahan. Perempuan pada masa kini tidak semata-mata menjadi ibu rumah tangga tetapi juga aktor penunjang atau bahkan mungkin penopang utama perekonomian keluarga sehingga jika dikembalikan pada teori peran gender maka perempuan pada masa kini dapat berdiri sejajar dengan kaum laki-laki.

4 Perempuan Dalam Proses Pembangunan

Adanya ketimpangan distribusi pendapatan terutama yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya dimensi manusia dan masyarakat dalam pembangunan serta mempermasalahkan harkat dan martabat manusia dan masyarakat di hadapan manusia dan masyarakat yang lain seperti yang dikemukakan Mosse (1993), seharusnya pembangunan memiliki tujuh elemen-elemen. Elemen-elemen tersebut adalah:

- a) Penanggulangan kemiskinan
- b) Keterlibatan semua orang secara demokratis dan adil
- c) Perbaikan aksesibilitas laki-laki dan perempuan terhadap barang dan jasa esensial
- d) Penciptaan berbagai basis produktif
- e) Pembentukan kembali pembagian kerja secara seksual
- f) Perbaikan pranata politik untuk melindungi hak manusia (termasuk perempuan) dan masyarakat
- g) Penghargaan terhadap nilai kultural dan aspirasi kelompok

Kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi dan pembangunan terutama bidang pertanian di negara-negara berkembang tidak dapat diragukan lagi. Di Afrika yang sistem pertaniannya masih bersifat subsisten dan memakai sistem perladangan berpindah, hampir seluruh tugas dalam memproduksi pangan dikerjakan oleh perempuan, sementara tugas laki-laki hanya membuka lahan untuk ditanami. Selain tugas di atas perempuan masih memiliki tugas sehari-hari yang lain yakni memelihara ternak, pengumpul kayu bakar, menekuni industri rumah tangga untuk menambah penghasilan dan lain-lain selain tugas yang bersifat kodrati yaitu menjalani fungsi reproduksi, menyusui dan mengurus rumah tangga. Namun dalam kenyataannya pembangunan terutama di negara-negara sedang berkembang yang masih memegang erat nilai-nilai feodalistik dan patriakal seringkali peran perempuan yang sangat berat tersebut hanya diabaikan. Mereka hanya dianggap sebagai obyek dari pembangunan, obyek yang perlu diberdayakan tanpa peluang untuk berperan sesuai dengan kemampuannya. Pembangunan yang seperti itu hanya menempatkan posisi perempuan di pinggiran (termarginalisasi) sebagai contoh misalnya apa yang terjadi dengan pembangunan pertanian di Afrika India dan Pakistan yang telah menghilangkan peran tradisional dari para perempuannya di bidang pertanian karena dialihkan kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki memperoleh kesempatan memperoleh pelatihan di bidang pertanian lebih besar sehingga kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan teknisnya terhambat. Sehingga perempuan justru dirugikan dengan adanya modernisasi. Selain pendekatan di atas, perempuan hanya ditonjolkan perannya sebagai ibu rumah tangga, kelompok terbelakang dalam masyarakat yang dianggap sebagai penghambat dalam proses pembangunan. Inilah yang menyebabkan peran ekonomis perempuan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi terabaikan.

Dalam tahap berikutnya dimana pembangunan sangat mementingkan pertumbuhan ekonomi, perhatian pembangunan terhadap perempuan hanyalah sebatas melihat masalah reproduksi mengingat jumlah populasi merupakan variabel yang krusial dalam penentuan keberhasilan pembangunan ekonomi melalui variabel besarnya pendapatan per kapita (Rissy, Yafet, 1999). Oleh karena itu selanjutnya pemerintah NSB mengikutsertakan perempuan dalam proses pembatasan kelahiran melalui melalui penggunaan alat kontrasepsi, program kesehatan ibu dan anak serta program-program yang sejenis. Namun menurut Mosse(1996: 199-200) program ini lebih merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan nasional per kapita dan

meningkatkan pertumbuhan. Dengan demikian keterlibatan perempuan dalam pembangunan bukan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan meningkatkan kesempatan menikmati kue pembangunan lebih banyak bagi perempuan itu sendiri, melainkan untuk mengejar tujuan-tujuan praktis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Buserup (1970) dalam Ina Hunga (1999) dan Saptari (1996) juga mengajukan kritik terhadap hampiran pembangunan yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kritik yang dikemukakannya adalah :

- a) Dengan terlalu mengandalakan GNP dalam mengukur perubahan maka akan menjadi tidak terlihat ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan pembangunan tersebut, antara lain ketimpangan yang terjadi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
- b) Adanya penggeseran penggunaan tenaga kerja perempuan akibat penggunaan teknologi dan akibat dari adanya anggapan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih terampil dari pada pekerja perempuan.

Karena kelemahan pendekatan pembangunan seperti yang dikemukakan di atas maka muncullah pendekatan pembangunan berikutnya yang lebih memperhatikan kaum perempuan. Pendekatan ini muncul tahun 1970-an yang kemudian disebut dengan konsep *Women In Development* (WID). WID ini memberikan penekanan kepada bagaimana kaum perempuan diintegrasikan dalam pembangunan dengan cara memberikan tekanan pada sisi produktif kerja dan tenaga perempuan sehingga perempuan mampu menjadi penghasil pendapatan (Mosse, 1996). Namun demikian konsep WIP tersebut dianggap mengandung kelemahan sehingga mendapatkan kritikan karena (1) melulu menganggap bahwa sumber dari ketidakadilan yang terjadi pada pembangunan ada pada diri individu si perempuan, padahal justru seringkali sistemlah yang menciptakan ketidakadilan tersebut. (2) banyak perempuan yang telah menempati posisi sebagai pengambil kebijakan justru menelurkan keputusan yang bias dan tidak adil bagi kaumnya (3) nilai kerja dan posisi perempuan masih belum mendapatkan penghargaan yang jelas dalam masyarakat (Saptari dan Holzner (1997) dalam Rissy, Yafet, 1999).

Karena kelemahan konsep WID tersebut maka muncul konsep baru yaitu *Woman and Development* (WAD) pada akhir tahun 1970-an kemudian disusul oleh konsep Gender and Development (GAD). Kehadiran WAD adalah reaksi dari kelemahan WID. WAD mendasarkan teorinya pada analisis neo-Marxis yang melihat lemahnya posisi perempuan adalah akibat dari struktur internasional tentang keadilan kelas. Pendekatan WAD dititikberatkan pada bagaimana mengubah struktur internasional dan terjadinya masyarakat tanpa kelas (Mosse, 1996).

GAD memberikan pendekatan yang bersifat multidimensi. Menurut konsep ini kerangka pikir dan teori tentang pembangunan harus dipertanyakan dan dikoreksi sehingga sejak awal perempuan dianggap sebagai bagian yang integral dari pembangunan. Dengan demikian tujuan strategis dari konsep ini adalah kesejahteraan

perempuan secara menyeluruh. Perempuan dan laki-laki bersama-sama sejak awal setara dalam pembangunan.

5. Realitas Posisi Perempuan dalam Pembangunan di Indonesia

Dalam realitas pembangunan di Indonesia, perempuan masih merupakan bagian terbesar dari kelompok miskin di Indonesia. Namun demikian sebenarnya perempuan memiliki potensi besar dalam proses pembangunan yang dilaksanakan (Sutrisno, Lukman, 1997). Sektor yang paling tinggi daya serapnya terhadap perempuan adalah sektor pertanian (49,2%), kemudian diikuti sektor perdagangan (20,6%) selanjutnya disusul oleh sektor manufaktur (14,2%). Sensus Penduduk (1990). Namun demikian apa yang dirasakan oleh kaum perempuan Indonesia tidaklah sama dengan apa yang dirasakan oleh perempuan India dan Afrika. Hasil pembangunan yang dicapai telah berhasil meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat umumnya dan dalam kegiatan ekonomi pada khususnya. Jika sebelumnya perempuan hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga maka kini semakin banyak perempuan yang bekerja. Adapun faktor yang mempengaruhinya tersebut diantaranya adalah peningkatan pendidikan perempuan serta adanya pergeseran budaya akibat dari adanya dampak globalisasi. Dampak dari perubahan itu terlihat dari peningkatan jumlah angkatan kerja. Tahun 2003 sebanyak 35% dari seluruh angkatan kerja adalah perempuan (Supenti, Titin, 2004). Sumbangan perempuan terhadap perekonomian di Indonesia terlihat dari tingkat partisipasi kerja (TPAK) perempuan yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap tenaga kerja. Dan Selama kurun waktu 1980 -1990 tingkat partisipasi kerja perempuan meningkat sebesar 55% sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat 35,5% (Indraswari, 2005)

Namun demikian, dalam dunia kerja sebagian besar perempuan masih memiliki kualitas yang rendah sehingga banyak pangkatan kerja perempuan hanya dapat bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan ketrampilan yang rendah. Berdasarkan hasilkan Sakernas 2003 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar jauh lebih tinggi (41% dari pekerja) dari pekerja laki-laki yang tidak dibayar (8% dari pekerja) (Supenti, Titin, 2004). Pada umumnya ketrampilan yang mereka miliki terbatas, lagipula mereka masih dibatasi oleh nilai-nilai kultural mengenai jenis pekerjaan yang digeluti yang berbeda dengan kaum lelaki yang bebas memperoleh pekerjaan dan pendidikan untuk menunjang pekerjaannya (Sutrisno, Lukman, 1997).

Profil perempuan dalam masa sekarang ada dalam situasi yang dilematis. Disatu sisi perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor tetapi dihadapkan pula pada tuntutan agar perempuan tidak melupakan kodratnya yang menempel pada citra perempuan itu sendiri. Citra tersebut akhirnya oleh pemerintah dilembagakan dalam program pembangunan yang kemudian disebut menjadi Panca Tugas Perempuan yakni (1) sebagai pendamping suami, (2) sebagai pendidik generasi muda (3) sebagai pengatur rumah tangga (4) sebagai tenaga kerja, dan sebagai anggota organisasi masyarakat.

6. Penutup

Fenomena tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun di Negara berkembang tidak dapat dipungkiri. Walaupun di Indonesia perempuan adalah masih merupakan sebagian besar dari kelompok miskin yang ada tetapi keterlibatan mereka dalam bidang pembangunan semakin meningkat. Keterlibatan perempuan aktifitas ekonomi tersebut tercermin dalam tingkat partisipasi kerja (TPAK) perempuan, namun demikian keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi masih sering mendapat kendala berupa kecenderungannya untuk mendapatkan posisi yang terpinggirkan. Hal itu khususnya bagi perempuan berpendidikan menengah ke bawah terutama mereka yang bekerja di sektor industri. Namun terlepas dari semua kelemahan di atas ternyata keterlibatan perempuan dalam aktifitas publik semakin meningkat hal itu ditunjukkan oleh peningkatan TPAK perempuan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Linkolin, 1999. *Ekonomi Daerah*, Yogyakarta:BPFE
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Fakih, Mansour, 1999. *Analisis Gender*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Hunga, Ina, 1999. *Perempuan Dalam Pembangunan*, Dian Ekonomi, Maret 1999
- Indraswari, 2005. *Dikotomi Gender-Sebuah Tinjauan Sosiologis*.
<http://home.Unpar.ac.id/~indras>
- Meier, Gerald M & Robert E Baldwin, 1957. *Economic Development: Theory, History, Policy*, New York:John Wiley & Sons
- Mosse, Julia Claves, 1996. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rissy, Telnoni, 1999. *Investasi Human Capital dan Pembangunan Ekonomi*, Makalah tidak dipublikasikan
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzver, 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Grafiti 1996
- Sutrisno, Lukman, 1997. *Kemiskinan , Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Todaro, Micel P dan Stepen C Smith , 2003. *EconomicDevelopment*, Eight edition, Pearson
- Yuono, Prapto, 1999. *Konsepsi Pembangunan dalam Perspektif Historis*, Salatiga: Dian Ekonomi 1999